

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ancel, Marc, Social Defense. A Modern Approach to Criminal Problems,
(London, Routledge & Kegan Paul, 1965).

Anwar, Yesmil dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 2008, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:
Perkembangan Penyusunan Konsep kUHP Baru”, Prenada Media
Group, Jakarta.

Attenborough, F.L. (ed. And trans) 1992, *The Laws of The Earliest English Kings*,
Cambridge University Press, Reprint March 2006, The Labook
Exchange, Ltd. ISBN 1-58477-583-1.

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005, h. 942, Akses 16 September 2018.

Fajar, Mukti, N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif
& Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Garner, Bryan A. *Black’ Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h.
1278.

Hadi, Sutrisno, 1985, *Metodelogi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta.

-----, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum*

Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Istanto, Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, CV Ganda, Yogyakarta

Jonkers, J.E, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina
Aksara, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Edisi ke: V*.

Krisnawati , Dani, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto,
Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*,
Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan.

Kusumo, Sumaryo Suryo, 2010, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*,
Tatanusa, Jakarta.

Loqman, Loebby 1993, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke-2*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-*
5, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar: Cetakan*
Ke-5, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,
Cetakan Pertama, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*
(Corporate Criminal Responsibility) Edisi ke -2, Cetakan ke-1,
Alumni, Bandung.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa
Media, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung:Penerbit Alumni,
1981),

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting*
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,,
Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,
Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R. 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-*
Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Suwardjono, Maria SW. 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 (drt) Tahun 1951 tentang Amunisi Lembaran Negara
Republik Indonesia (LNRI) tahun 1951 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1963 Nomor 101, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2595

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1999 Nomor 73, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3849

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2005 Nomor 119, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4558.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2012 Nomor 53, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4389.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi September Tahun 2019

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XV,

Makar Dalam Kasus Sultan Hamid II Pada Maret 1962

Putusan Mahkamah Agung No. 2106 K/Pid/2008

Putusan Mahkamah Agung No. 1977 K/Pid/2008

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1889 K/Pid/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pid/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/Pid/2012

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 58/Pid/2014/PT JAP

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 54/PID/2019/PT JAP

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 115/Pid.B/2013/PN.SRG

Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Srg

D. Jurnal

Dworkin, Roger B. (1969) "*The Limits of the Criminal Sanction, By Herbert L Packer,*" Indiana Law Journal: Vol. 44 :Iss.3, Article 7.

Endri, Penanggulangan Kejahatan Politik Dalam Undang-Undang Pemilu, Jurnal Selat, Mei 2014, vol. 1 no. 2.

Institute for Criminal Justice Reform, *Mengembalikan Makna "Makar" dalam Hukum Pidana Indonesia*, Journal Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Addition Oktober 2017.

M. Denis Szabo, *Political Crimes; A Historioal Perspeotive*, Journal Of International Law And Policy Vol. 2, 1972.

Md. Kamruzzaman, Md. Rana Parvez. *Political Crime in South Asia: A Theoretical Explanation*. Journal of Political Science and International Relations. Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 1-11.
doi:a10.11648/j.jpsir.20180101.11.

Oppenhiem: International law. Lauterpacht, Edited, 8th edition, Volume 1, Peace, 1955.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana, Jurnal Humaniora Vol.3 No.2 Oktober 2012: 422-437.

Rio Armanda Agustian, *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Prespektif Delik Politik Di Indonesia*, Jurnal MMH, Jilid 40 No. 3 Juli 2011.

Salim Ibrahim Ali dkk, *Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal*, International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(1) May 2017.

Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

S.N.Jain, *Doctrinal Research and Non-doctrinal Legal research*, Reprinted from 17 journal of the Indian Law Institute, (1975).

Stuart Fort, *Crimes Against Humanity At The Extra Ordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Conection With Armed Conflict Required?* *Pacific Basib Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007.

Vijay M Gawas, *Doctrinal legal research method a guiding principle in reforming the law and legal system towards the research development*, International Journal of Law, volume 3, issue 5, September 2017.

Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono, *The Problematical Meaning of Aanslag-Aanslag tot en feit Comarison of Treason in the Translated Version of the Indonesia Criminal Code and the Dutch Version*,

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 Tahun 2017 [ISSN
2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana
Konsumen Di Indonesia*, dalam ADIL Jurnal Hukum, Volume 2,
Nomor 1, April 2011, Jakarta.

E. Artikel

Andika Wahyudi Gani, 2019, *Eksistensi Nilai Budaya Siri Na Pacce Terhadap
Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Asas Legalitas Pada
Masyarakat Bugis-Makassar*, Disertasi Pasa Fakultas Hukum
universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

David Hardiagio, 2020, *Pemikiran Keliru Tentang “Makar” dalam Diskusi
Akademik*, Legal Talk Vol. VII, Juni 2020.

Lucky Endrawati dan Setiawan Nurdysakti, *Perumusan Kembali Norma
Kejahatan politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Sebagai Upaya Kepastian*, Makalah
Ilmiah.

Nani Mulyati, 2018, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban
Pidananya Dalam Hukum Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Rio Armanda Agustian, *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam
Prespektif Delik Politik Di Indonesia*, Tesis

F. Internet

Petrick Matansi, *Sultan Hamid II Tidak Terbukti Melakukan Makar*,

<https://tirto.id/sultan-hamid-ii-tidak-terbukti-melakukan-makar-boCP>,

diakses pada akses pada Sabtu 18 Januari 2020.

<http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-*

Complete and Unabridged 2nd Edition. diakses 16 Desember 2019.

Cambridge Dictionary, “Onslaught”, [http://dictionary.cambridge.org/ dictionary /english](http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english)

[/onslaught](http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/onslaught), diakses 2 Juni 2020.

Iman Nasima, Sejarah Pembahasan Pasal 107 KUHP, <https://nasima.wordpress.com>

[/2016/12/23/sejarah- pembahasan-pasal-107-kuhp/](https://nasima.wordpress.com/2016/12/23/sejarah-pembahasan-pasal-107-kuhp/), __diakses 2 Juni

2020.

G. Sumber Lain

Edward O.S Hiariej dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di

Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at 21 Juni 2019.

Supriyadi, 2018, “Bahan Ajar Dalam Mata Kuliah Kuliah Kebijakan Hukum

Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Marcus P Gunarto, 2019, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada.

Eddy O.S Hiariej, Disampaikan dalam Webinar dengan tema *Penjelasan Lengkap “Tindak Pidana Makar”*, Dema Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.